



Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Bahan LPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. .

Padang, Januari 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, terakhir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Usaha Daerah.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, telah disusun Rencana Strategis untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini menjadi dasar dan acuan penyusunan program kerja bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Usaha Daerah.

B. TUPOKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Usaha Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan Gubernur di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan teknis di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitas Kerjasama Dunia Usaha;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan fasilitas Kerjasama Dunia Usaha; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka struktur organisasi yang dibentuk terdiri dari jabatan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari;
 - Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal , terdiri dari;
 - Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Deregulasi Penanaman Modal;
 - Seksi Pemberdayaan Usaha;
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal;

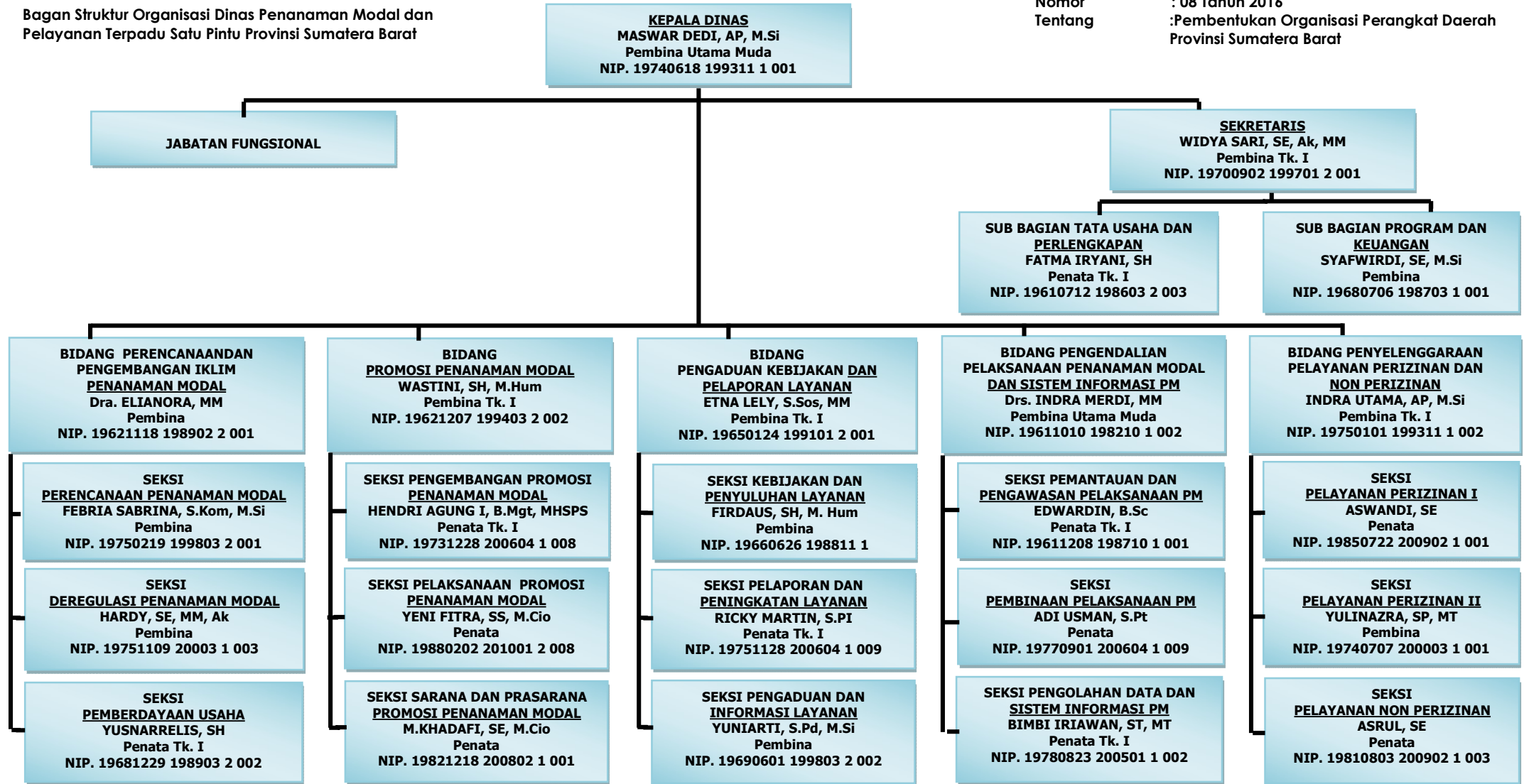
- a. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, terdiri dari;
 - Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari;
 - Seksi Pelayanan Perizinan I;
 - Seksi Pelayanan Perizinan II;
 - Seksi Pelayanan Non Perizinan;
- g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan, terdiri dari;
 - Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;
 - Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat secara lengkap yang menjelaskan koordinasi antar bagian dan dalam hal pendelegasian perintah dari atasan ke bawahan dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1.

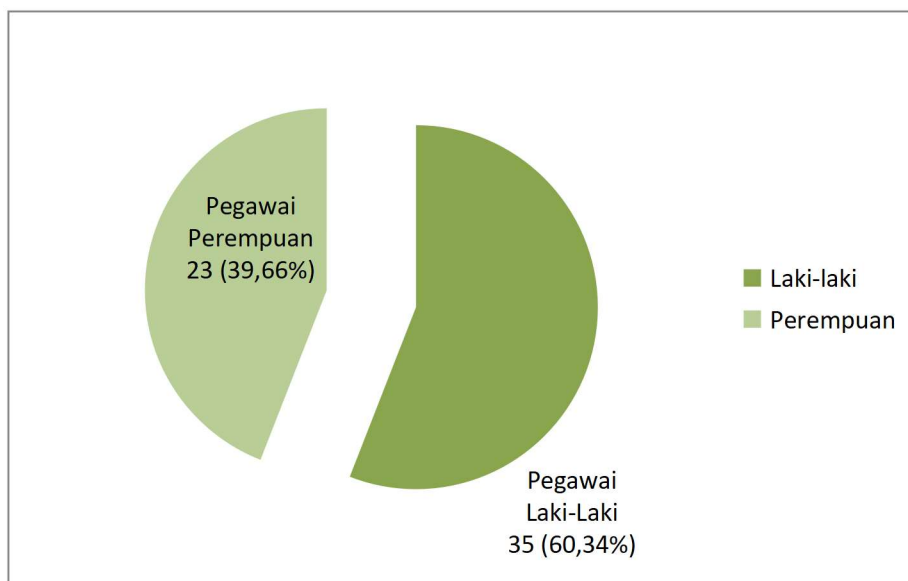
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
 Nomor : 08 Tahun 2016
 Tentang : Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menjadi pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya diuraikan menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang berjumlah 58 orang. Komposisi pegawai tersebut berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 35 orang (60,34%) laki-laki dan 23 orang (39,66%) perempuan. Dari data tersebut jumlah perempuan dengan laki-laki sebanding sehingga tidak memiliki pengaruh secara terhadap lingkungan dan budaya kerja serta kinerjanya.

Gambar 2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Berikut adalah komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, seperti dapat dilihat pada tabel berikut:

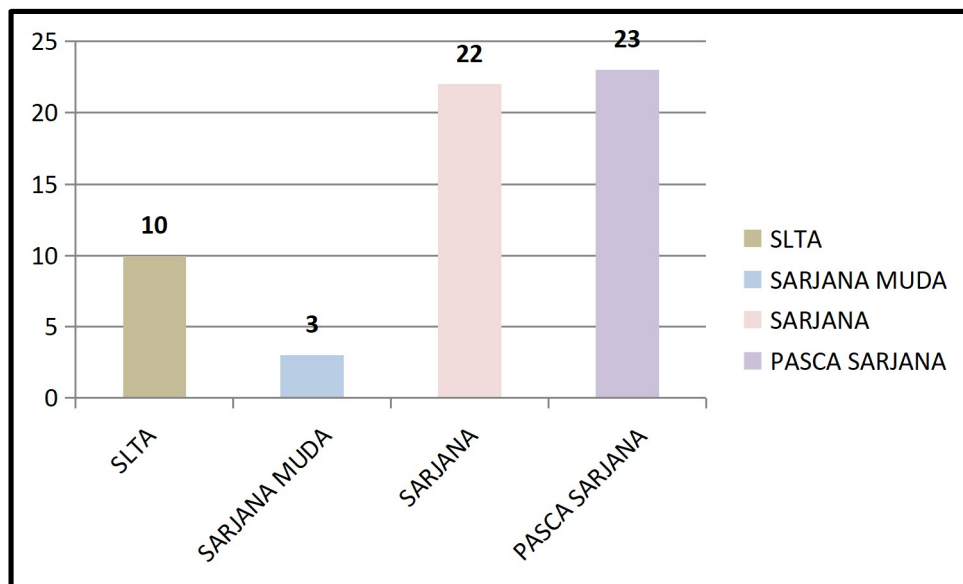
Tabel 1.1.
Daftar Tingkat Pendidikan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	SLTP	-	-	0	0%
2	SLTA	8	2	10	17,24%
3	DIPLOMA III/ D-3	1	2	3	5,17%
4	STRATA 1	12	10	22	37,93%
5	STRATA 2	14	9	23	39,66%
6	STRATA 3	-	-	0	0%
	JUMLAH	35	23	58	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Dilihat dari segi pendidikan, komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sangat memadai untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat karena lebih dari 82,76% pegawai sudah berpendidikan sarjana, diantaranya 39,66% pegawai sudah berpendidikan pasca sarjana. Khusus untuk bidang pelayanan perizinan perlu adanya penambahan pegawai yang berlatar belakang teknis terkait layanan perizinan disamping melalui diklat teknis/substantif, diklat gelar maupun diklat fungsional. Secara grafik komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan golongan seperti dapat dilihat pada tabel di bawah:

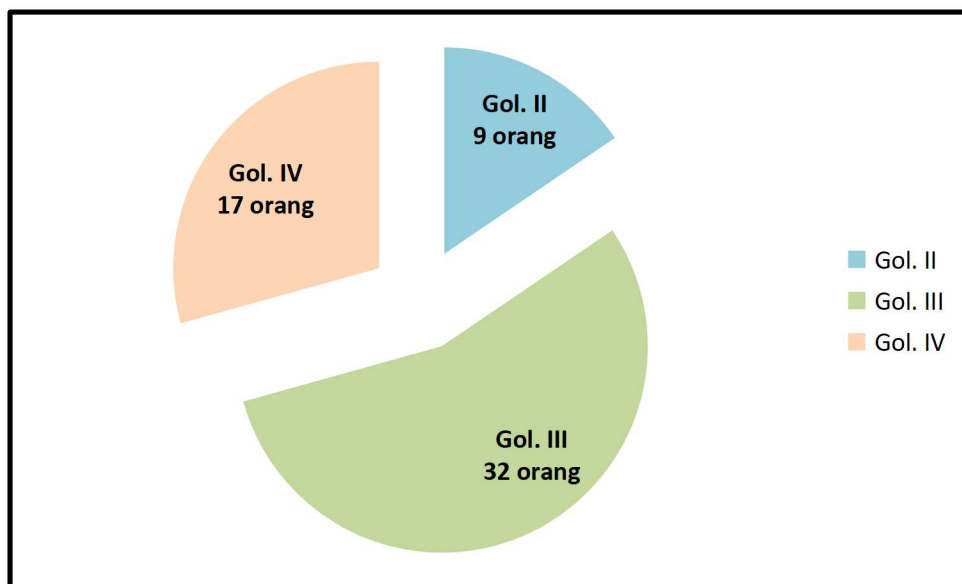
Tabel 1.2.
Daftar Golongan Pegawai DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6
1	Golongan I	-	-	0	0%
2	Golongan II	7	2	9	15,52%
3	Golongan III	19	13	32	55,17%
4	Golongan IV	9	8	17	29,31%
	JUMLAH	35	23	58	100,00%

Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

Sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tercatat 84,48% pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah golongan III dan IV, merupakan pegawai yang berpendidikan Strata 2 dan Strata 1 dan Sarjana Muda. Pegawai yang berpendidikan Strata I pada umumnya sudah menduduki pangkat puncak pada jenjang kepangkatannya dan telah memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun. Berikut jumlah PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per golongan:

Gambar 4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Pada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018



Sumber : Subag Tata Usaha dan Perlengkapan DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat

C. ANGGARAN

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 didukung oleh Anggaran dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.214.917.090,32,- (perubahan anggaran) yang terdiri dari :

a. **Belanja Tidak Langsung** : **Rp. 5.624.333.236,32**

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 3.801.487.157,32
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 1.793.300.426,00
- Insentif Pungutan Retibusi : Rp. 29.545.653,00

b. **Belanja Langsung** : **Rp. 11.590.583.854,00**

Terdiri dari:

- Belanja langsung pokok : 5 Program, 29 kegiatan.
- Belanja langsung urusan : 2 Program, 27 kegiatan.

D. IVENTARISASI ASET

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai untuk mendukung pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2018 sebesar Rp. 5.667.405.417,00,- semuanya merupakan aset tetap yang terdiri dari Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.491.500,00,-. Dan Aset Lainnya sebesar Rp. 649.685.500,-

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat per Desember 2018, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Aset DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2018

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	-
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat besar - Alat-alat angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi	2 unit 11 unit 2 unit 1 unit 467 unit 11 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	-
4	Golongan Aset Tetap lainnya Buku Perpustakaan	15 Buah

	Barang Bercorak Kebudayaan	3 Unit
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak berwujud	5 unit
2	Aset tidak bermanfaat	49 unit

Sumber :Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP Tahun 2018

E. SARANA DAN PRASARANA

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Baratbelum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk prasarana gedung, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat belum memiliki gedung yang cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas secara profesional.

Sarana dan prasarana gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat terdiri dari ruangan Kepala Badan, ruangan Sekretariat, ruangan bidang pelayanan perizinan, ruangan bidang perencanaan, ruangan pengendalian, ruangan pengaduan dan ruangan bidang promosi. Selain itu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Baratjuga terdapat ruangan rapat yang dipergunakan untuk pertemuan berkala dan rapat teknis dengan DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat memiliki 8 (delapan) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 3 (tiga) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam table 1.4 dibawah:

Tabel 1.4.
Daftar Kendaraan Dinas
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	Honda	Caraka
2	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
3	Sepeda Motor	Honda Vario	Operasional Administrasi
4	Mobil	Kijang Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Honda Accord	Operasional Administrasi
6	Mobil	Mitsubishi Kuda	Operasional Administrasi
7	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
8	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi
9	Mini Bus	Pajero Sport	Operasional Kepala Badan
10	Mobil Double Gardan	Mitsubishi	Operasional Administrasi
11	Mini Bus	Kijang Innova	Operasional Administrasi

Sumber :Laporan Tahunan Barang Milik Daerah (BMD) DPM & PTSP2018

F. INFORMASI PELAYANAN

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, jenis pelayanan yang dilaksanakan adalah khusus pelayanan perizinan dan non perizinan. Adapun perkembangan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat,dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Rekapitulasi Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan
DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2011-2018

TAHUN	PERIZINAN	NON PERIZINAN	TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2011	3	-	3	3 Izin
2012	4	-	4	4 Izin
2013	631	13	644	631 Izin; 13 Rekomendasi
2014	555	7	562	555 Izin; 7 Rekomendasi
2015	665	20	685	665 Izin; 20 Rekomendasi
2016	1.098	7	1.105	1.098 Izin; 7 Rekomendasi
2017	1.411	708	2.119	1.411 Izin; 708 Rekomendasi
2018	1.007	2.118	3.125	1.007 Izin; 2.118 Rekomendasi
TOTAL	5.374	2.873	8.247	4.367 Izin; 755 Rekomendasi

Sumber :Buku Data dan Informasi Pembangunan Tahun 2011-2018

Perkembangan pelayanan dasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan dapat tercapai dengan tersusunnya potensi dan peluang investasi kabupaten/kota se Sumatera Barat serta Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal 1 sektor, yakni Pariwisata.
2. Pelayanan dasar Kerjasama Penanaman Modal oleh PDPPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Kecilkabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha tingkat Nasional/asing dengan indikator terselenggaranya Forum Komunikasi Usaha Daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara usaha kecil kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan pengusaha nasional/asing dapat tercapai sebanyak 1 (satu) kali pertemuan sesuai target nasional.

3. Pelayanan dasar Promosi Penanaman Modal Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dengan indikator terselenggaranya promosi peluang penanaman modal dalam negeri sebanyak 17 (tujuh belas) event dengan rincian, mengikuti event/pameran promosi dalam negeri sebanyak 6 (tujuh) event dan luar negeri sebanyak 11 (sepuluh) event dan gelar potensi daerah sebanyak 1 (satu) kali.
4. Pelayanan dasar Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDPPM di tingkat provinsi dengan tingkat capaian sebesar 84,10%.

Dalam rangka penyelenggaraan PTSP telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 87 Tahun 2012 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari Gubernur kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat selaku Penyelenggara PTSP meliputi sebanyak 247 jenis perizinan yang terdiri dari 19 sektor. Kinerja PTSP pada tahun 2018 secara keseluruhan dapat dinilai sangat baik, dimana jumlah izin yang diterbitkan oleh PTSP Sumatera Barat sebanyak 1.007 izin dan 2.118 rekomendasi. Dari 19 sektor yang dilayani, hanya 2 sektor yang tidak ada penerbitan izin ataupun rekomendasi yaitu sektor pariwisata dan perumahan rakyat dan pertanahan. Rincian perizinan/non perizinan yang diterbitkan PTSP sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Perizinan/Non Perizinan yang Diterbitkan PTSP
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	SEKTOR	IZIN	NON IZIN (REKOMENDASI)
1	2	3	4
1	Penanaman Modal	7	-
2	Perindustrian Dan Perdagangan	5	12
3	Energi Dan Sumber Daya Mineral	212	-
4	Tenaga Kerja	122	21
5	Kesehatan	12	36
6	Kehutanan	66	1
7	Pendidikan	3	-
8	Kelautan dan Perikanan	381	-
9	Perkebunan	36	-
10	Lingkungan Hidup	3	-
11	Pariwisata	-	-
12	Perhubungan	129	132
13	Peternakan	-	84
14	PU dan Penataan Ruang	6	-
15	PSDA	5	-
16	Sosial	19	1
17	Perumahan Rakyat, Pertanahan	-	-
18	Koperasi dan UKM	1	-
19	Kesbang Pol	-	1.832
JUMLAH		1.007	2.118
TOTAL		3.125	

Sumber : Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2018

5. Pelayanan dasar Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman modal dan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Sudah dilaksanakan pertemuan berupa Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bagi Aparatur Prov/Kab/Kota dan Dunia Usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan sumber dana dari APBD dari 17 perusahaan yang

ditargetkan terlaksana 19 perusahaan atau dengan capaian 111,76% disamping itu juga ada sumber dana dari APBN(Dekonsentrasi).

6. Pelayanan dasar Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dapat tercapai 100%, dengan jumlah jenis pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE sebanyak 4 (empat) jenis pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS) juga telah berlakunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
7. Pelayanan dasar Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal dengan indikator terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha dapat tercapai melebihi target nasional yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali.

II. DOKUMEN PERENCANAAN

A. RENSTRA

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 dinyatakan bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Kepala SKPD, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah. Dan selanjutnya Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab bidang di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sekaligus memberikan motivasi, pengembangan inovatif, dan kreatifitas untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penanaman modal daerah.

- b. Memberi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan untuk mencapai visi dari pelaksanaan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
- c. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;
- d. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
- e. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
- f. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- g. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

VISI

Dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kewenangan daerah dibidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Usaha Daerah agar terarah dan terfokus pada hasil yang ingin dicapai supaya tercipta kesamaan pandangan dan partisipasi melalui perumusan, masukan, saran, aspirasi dan inspirasi seluruh bidang-bidang, disusun rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Rumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat mencerminkan apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2016-2021 adalah:

**"MENJADIKAN SUMATERA BARAT SEBAGAI DAERAH TUJUAN INVESTASI YANG MENARIK,
UNGGUL DAN BERDAYASAING"**

Adapun makna pokok yang terkandung dalam visi yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di atas, adalah:

- a. **Tujuan investasi yang menarik**, maksudnya mampu menjadikan dan mengkomunikasikan semua potensi investasi yang terdapat di Sumatera Barat, sehingga mampu menarik minat para calon investor untuk menanamkan modalnya di masa mendatang.
- b. **Unggul**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan sumber daya daerah dan pelayanan investasi yang berkualitas melalui serangkaian pendekatan yang inovatif dan professional.
- c. **Berdayasaing**, maksudnya mampu mengeksplorasi keunggulan dan keunikan sumberdaya daerah dan pelayanan investasi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

Visi diatas merupakan kebutuhan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang merupakan SKPD penunjang dan juga dipandang perlu untuk meningkatkan pelayanan bagi publik. Pada saat sekarang permasalahan tatanan pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan instansi dengan mengembangkan seluruh potensi pembangunan di daerah.

MISI

Misi suatu instansi pemerintah merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah negara.

Selaras dengan Visi yang telah ditetapkan, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Sumatera Barat.

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- a. Mendukung terwujudnya peningkatan daya tarik investasi di Sumatera Barat;
- b. Meningkatkan pelayanan investasi yang berkualitas.

Visi dan Misi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sudah mendukung visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat, yakni pada misi kedua ***“Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional”*** dan misi ke empat ***Meningkatnya Ekonomi Masyarakat yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah”***

B. RENJA TAHUNAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021, menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang-bidang dan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan program berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat yang menyangkut penanaman modal sesuai kewenangan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal di atas untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan mewujudkan tujuan dan sasaran daerah, Tahun 2018 program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (12 Kegiatan);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (10 Kegiatan);
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 Kegiatan);
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 Kegiatan);
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (5 Kegiatan);
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (17 Kegiatan);
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (10 kegiatan).

Rencana Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program dan kegiatan DPM & PTSP Tahun 2018 adalah :

NO.	NAMA PROGRAM	JUMLAH DANA (Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.135.494.329,-	12 kegiatan
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.451.205.200,-	10 kegiatan
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.400.000,-	1 kegiatan
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	271.361.050,-	1 kegiatan
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.736.850,-	5 kegiatan
VI.	Program Pengembangan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.797.486.700,-	17 kegiatan
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.491.539.725,-	10 kegiatan
JUMLAH		11.590.583.854,-	56 kegiatan

Sumber : DPPADPM & PTSP Tahun 2018

III. DATA KINERJA DAN KEUANGAN

A. DATA KINERJA SKPD

Pelaksanaan Program Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 didukung oleh Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 17.214.917.090,32, yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.624.333.236,32

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 3.801.487.157,32
- Tambahan Penghasilan PNS : Rp. 1.793.300.426,-
- Insentif Pungutan Retribusi : Rp. 29.545.653,-

b. Belanja Langsung : Rp. 11.590.583.854,-

Terdiri dari : 7 Program dan 56 Kegiatan.

Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu.

Jumlah Anggaran yang disediakan oleh APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 untuk masing-masing Program adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Program dan Anggaran DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2018

NAMA KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
1		2
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.135.494.329,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.451.205.200,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.400.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	271.361.050,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.736.850,-
6.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.797.486.700,-
7.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.491.539.725,-
Total		11.590.583.854,-

B. KEGIATAN TAHUN 2018

Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN(Rp.)
1	2	3
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.135.494.329,-
1	Penyediaan jasa surat menyurat	28.651.000,-
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	167.935.280,-
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	28.800.000,-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.000.000,-
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.460.000,-
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.712.000,-
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	424.958.000,-
8	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	14.850.000,-
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	28.500.000,-
10	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	113.595.237,-
11	Penyediaan Jasa Tenaga Sopir	100.599.447,-
12	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	177.433.125,-
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.451.205.200,-
1	Pengadaan Mebeuler	148.461.500,-
2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer	290.359.900,-
3	Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	230.000.000,-
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	59.500.000,-
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	94.700.000,-
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000,-
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler	9.500.000,-
8	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	68.333.800,-
9	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	400.000.000,-
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.350.000,-
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.400.000,-
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	44.400.000,-

IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	271.361.050,-
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	271.361.050,-
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	398.736.850,-
1	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	63.578.150,-
2	Penatausahaan Keuangan SKPD	229.141.750,-
3	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.471.450,-
4	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	37.341.500,-
5	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan	27.204.000,-
VI	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	3.797.846.700,-
1	Penyelesaian Permasalahan Investasi	121.408.100,-
2	Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal	47.978.000,-
3	Promosi Investasi	1.793.093.500,-
4	Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal	150.677.850,-
5	Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat	187.700.000,-
6	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	123.929.000,-
7	Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat	103.334.800,-
8	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	90.676.700,-
9	Gelar Potensi dan Temu Usaha	234.044.000,-
10	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal	470.408.200,-
11	Forum Komunikasi Usaha Daerah	70.317.300,-
12	Koordinasi Promosi dan Misi Investasi	59.134.700,-
13	Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha	55.576.650,-
14	Koordinasi Strategi Promosi dan Peluang Investasi	36.883.800,-
15	Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja	39.629.500,-
16	Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	79.862.700,-
17	Forum Investasi Sumatera Barat	133.191.900,-
VII.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4.491.539.725 ,-
1	Forum PTSP	66.594.150,-
2	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	1.848.615.000,-
3	Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan	61.837.000,-

4	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan	97.671.000,-
5	Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Terpadu	60.829.500,-
6	Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi	504.556.525,-
7	Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	1.625.855.400,-
8	Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	67.936.000,-
9	Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	67.872.900,-
10	Penilaian Standar Mutu Perizinan	89.772.250,-
JUMLAH		11.590.583.854,-

C. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.135.494.329,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.123.043.050,- atau sebesar 97,97%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan realisasi anggaran kegiatan yang dibawah 95% adalah anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 86,04% disebabkan efisiensi dalam belanja paket pengiriman.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Keluaran:

Terwujudnya pengelolaan surat menyurat kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan dalam rangka tertib pelayanan administrasi perkantoran.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran:

terpenuhinya kebutuhan listrik, telpon, air dan jaringan internet, SIPKD dan yang online selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan suatu pemenuhan pokok kantor akan listrik, air, telepon dan internet.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Keluaran :

Tersedianya Alat Tulis Kantor kantor selama 12 bulan, dengan capaian 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Keluaran :

Tersedianya barang-barang cetakan seperti kertas kop, map, amplop, dan lain-lain, serta tersedianya biaya penggandaan selama 12 bulan, dengan capaian 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya pelayanan administrasi perkantoran.

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Tersedianya alat-alat dan komponen listrik untuk penerangan bangunan kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah tertunjangnya kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran :

Tersedianya biaya untuk langganan surat kabar selama 12 bulan baik itu media lokal maupun media nasional, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur.

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Keluaran :

Tersedianya anggaran untuk perjalanan dinas untuk melakukan koordinasi dan konsultasi baik dalam daerah maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil Dari kegiatan ini adalah terjalannya koordinasi dengan daerah kab/kota ataupun pusat terkait dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

8. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Keluaran :

Terlaksananya wirid pengajian dan senam di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.

Hasil :

Terbinanya mental dan fisik aparatur.

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Keluaran :

Tersedianya biaya makan minum untuk penyelenggaraan rapat-rapat rutin kantor selama 12 bulan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Keluaran :

Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja adalah 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya kebersihan kantor.

11. Penyediaan Jasa Tenaga Sopir

Keluaran :

Tersedianya jasa Tenaga Sopir kantor untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja adalah 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah lancarnya urusan dinas/operasional kantor.

12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Keluaran :

Tersedianya jasa Pengaman kantor untuk 12 bulan, dengan capaian kinerja adalah 100%.

Hasil :

Hasil dari kegiatan ini adalah terpeliharanya Keamanan dan Tertib kantor.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebesar Rp. 1.451.205.200,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 1.413.909.346,- atau sebesar 98,05%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% kecuali kegiatan Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi sebesar 86,27% yang merupakan sisa kontrak anggaran.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Pengadaan Mebeuler

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 30 unit mebeuler kantor yang terdiri dari 15 unit meja kerja dan 15 unit kursi kerja dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan lancarnya pelayanan DPM & PTSP serta terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur DPM & PTSP.

2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 35 unit perlengkapan kantor yang terdiri dari komputer, Laptop dan printer dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan lancarnya pelayanan DPM & PTSP serta terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur DPM & PTSP.

3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 1 set mikrofon untuk ruang sidang/rapat DPM & PTSP dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan lancarnya rapat dan pertemuan DPM & PTSP serta terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur DPM & PTSP.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kenyamanan dan produktivitas kerja PNS di lingkungan DPM & PTSP.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas DPM & PTSP yang berjumlah 8 unit yang terdiri dari (6 unit mobil dan 2 unit motor) selama 12 bulan , dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan sebanyak 59 unit, dengan capaian Kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

Keluaran:

Terpeliharanya meja, kursi dan mebel kantor lainnya sebanyak 26 unit, selama 12 bulan dengan capaian 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terwujudnya pemeliharaan mebeuler kantor.

8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD

Keluaran:

Tersusunnya pelaporan asset SKPD selama 12 bulan, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD.

9. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 2 unit kendaraan dinas/operasional yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2 yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja serta lancarnya pelayanan DPM & PTSP.

10. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran:

Dari kegiatan ini diperoleh 4 macam , 2 unit dan 3 set Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang akan meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya kinerja dan pelayanan DPM & PTSP.

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 44.400.000,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 44.400.000,- atau sebesar 100%.

Rincian realisasi untuk kegiatan program peningkatan disiplin aparatur inisebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Keluaran:

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk PNS DPM & PTSP, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp.271.361.050,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 268.344.904,- atau sebesar 98,89%.

Sisa Anggaran pada program dan kegiatan ini adalah efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan Pelayanan Prima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Sumatera Barat.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Keluaran:

Terlaksananya pengiriman PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk mengikuti Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam bertugas selama 12 bulan sebanyak 71 aparatur, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Meningkatnya profesional PNS di bidangnya.

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 398.736.850,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 389.305.839,- atau sebesar 98.82%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan SisaAnggaranyang tidak bisa direalisasikan atau efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program/ Kegiatan SKPD

Keluaran:

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran pada BKD seperti Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA dan DPPA, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Keluaran:

Tersedianya laporan bulanan dari penatausahaan keuangan yang dilakukan dan terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan dan keuangan (KPA, Bendahara, PPK, PPTK dan Pembantu Bendahara), dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Keluaran:

Outputnya adalah laporan terkait akuntabilitas kinerja, seperti perjanjian kinerja, bahan LKPJ Gubernur, LPPD, Laporan Kinerja dan lain sebagainya dan Pengukuran Kinerja Aparatur selama 12 bulan dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya kinerja SKPD DPM & PTSP.

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Keluaran:

Laporan Pemantauan dan Penilaian terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil:

Tersedianya data dan informasi terkait pelaksanaan program/kegiatan DPM & PTSP

5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Keluaran:

Tersedianya laporan Triwulan, Semester dan Tahunan, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Terwujudnya pengelolaan keuangan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebesar Rp. 3.797.846.700,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 3.750.963.067,- atau sebesar 97.43%.

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan realisasi anggaran kegiatan yang dibawah 95% adalah anggaran kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat sebesar 93,24%, Kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar 93,43% dan Kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat sebesar 90,18%.Sisa Anggaran pada kegiatan dalam program ini sebagian besar sisa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan. Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Keluaran:

Terfasilitasinya permasalahan sebanyak 9 perusahaan PMA/PMDN dari 7perusahaan yang ditargetkan dengan capaian kinerja sebesar 128,57% dan pembahasan proses penyelesaian permasalahan perusahaan melebihi target yang ditetapkan sebanyak 9perusahaan atau sebesar 128,57%.

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan penyelesaian permasalahan Investasi ini adalah tercapainya solusi pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN sebanyak 9 perusahaan atau sebesar 128,57% dari 7 perusahaan.

2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Keluaran:

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada penyelenggara pemerintahan di kabupaten dan kota se Sumatera Barat, masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan dan aturan terkait penanaman modal sebanyak 100 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%

Hasil:

Hasil yang dicapai dari kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal ini adalah memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan di kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan atau aturan terkait penanaman modal.

3. Promosi Investasi

Keluaran:

Terwujudnya keikutsertaan Provinsi Sumatera Barat dalam kegiatan promosi investasi baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri sebanyak 17 event, dengan capaian kinerja 100%.

Hasil:

Dari keikutsertaan Sumatera Barat dalam beberapa event promosi investasi yang diikuti, menghasilkan ketertarikan calon investor, diantaranya:

1. F. Lee Simmons, Jr dari Bioenergy Corporation untuk sektor energi dan Edward Wanandi di sektor pariwisata untuk kawasan Kandi di Kota Sawahlunto.
2. Ketertarikan Perusahaan Rushydro, Perusahaan Seafood Line, Fresh Vale dan Geotek yang menawarkan kerjasama di bidang penanganan bencana alam, dimana perusahaan ini memiliki teknologi penanggulangan bencana seperti gempa bumi. Kita ketahui, Sumatera Barat memiliki Lempeng Samudera Hindia dan Lempeng Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia membentuk Zona Benioff, yang secara terus menerus aktif bergerak ke arah barat-timur yang merupakan zona gempa dengan seismisitas cukup tinggi. Hal ini merupakan peluang bagi Sumatera Barat untuk meminimalisir dampak bencana gempa di Sumatera Barat. Selain itu, Rushydro yang bergerak di sektor energi terutama mini hydro ingin mengetahui lebih lanjut mengenai potensi besar mini hidro di Sumatera Barat. Dalam hal ini, Sumatera Barat memiliki 45 lokasi mini hydro dengan potensi sebesar 383.8. MW. Hal ini merupakan peluang bagi Sumatera Barat untuk menarik investor di sektor energy terbarukan.
3. Hasil dari pertemuan tersebut, KADIN Moscow tertarik untuk berinvestasi di sektor pengembangan karet. Pemerintah Provinsi Sumatra Barat akan menyiapkan lahan untuk pembangunan pabrik karet yang berlokasi di Kabupaten Sijunjung.

Dalam hal ini, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah penghasil karet terbesar di Sumbar selain Kabupaten Dharmasraya. Total lahan perkebunan karet di Sumbar mencapai 180.000 hektare, dengan sekitar 70.000 hektare tidak berproduksi lagi karena sudah tua dan perlu diremajakan. Dengan produksi karet hanya di kisaran 145.000 ton – 180.000 ton per tahun.

4. Selain itu, mengenai potensi unggulan Sumatera Barat, KADIN Moscow akan menerbitkannya di situs resmi Moscow Chamber of Commerce and Industry. Hal ini disampaikan langsung oleh President of Moscow Chambers of Commerce And Industri.
5. Mr. Atul Upadhyay, Direktur Star Overseas Ltd, investor yang berminat di sektor energi, terutama Hydro Power yang berlokasi di Moscow, Rusia

4. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Keluaran:

Tersedianya data Spasial Dasar dan Tematik yang terbaru sebanyak 1 (satu) sektor serta Terlaksananya Updating Data Potensi Peluang Investasi Sumatera Barat yang ada pada 19 Kabupaten/Kota dengan capaian kinerjanya 100% sesuai dengan target.

Hasil:

Tersedianya Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

5. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat

Keluaran:

Tersusunnya 300 buku profil peluang investasi Sumatera Barat, Leaflet peluang investasi Sumatera Barat 2.000 exemplar, buku direktori potensi investasi Sumatera Barat 100 buku dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil:

Tersedianya Data dan Informasi Potensi dan Peluang Investasi pada 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan capaian kinerja 100%

6. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Telaksananya Pertemuan Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dihadiri oleh 80 orang aparatur DPM & PTSP Kabupaten/kota se Sumatera Barat dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan didalam perencanaan, pelaksanaan penanaman modal, promosi, pengendalian dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hasil:

Dihasilkan 4 (empat) rumusan rekomendasi terkait Perencanaan, Pelaksanaan Penanaman Modal, Promosi, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu melebihi dari 3 (tiga) target rumusan yang yang ditetapkan sehingga capaian hasil kinerjanya juga 133,33%.

7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat**Keluaran:**

Tersusunnya buku data perkembangan penanaman modal sumatera Barat tahun 2017/2018 sebanyak 100 buah buku, dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Hasil:

Tersedianya data perkembangan realisasi investasi, fasilitas dan non fasilitas di 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat sehingga bisa dijadikan bahan pengambil kebijakan bagi stakeholders dan dunia usaha.

8. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.**Keluaran:**

Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN sebanyak 19 perusahaan dari 17 perusahaan yang ditargetkan.

Hasil:

- Adanya penyampaian LKPM oleh perusahaan PMA/PMDN dan pelaksanaan kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak 19 perusahaan dari 17 perusahaan yang diinginkan

9. Gelar Potensi dan Temu Usaha**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang calon investor yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah terinformasikannya potensi dan peluang investasi yang ada di kabupaten / kota di Sumatera Barat kepada calon investor yang mengikuti temu usaha.

10. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 100 orang calon investor yakni sebesar 100% dan penyampaian informasi penanaman modal kepada calon investor.

Hasil:

Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal ini terdiri dari 3 (tiga) bentuk kegiatan yaitu Forum Investasi Sumatera Barat, Pameran Minangkabau Summit 2018 dan Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa.

- **Forum Investasi Sumatera Barat**

Forum Investasi Sumatera Barat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 bertempat di Auditorium Gubernur Sumbar. Acara ini bertemakan *"Showcasing Investment Opportunities in West Sumatra's Tourism Industry"*

- **Pameran Minangkabau Summit 2018**

Pameran *"Minangkabau Summit 2018"* diselenggarakan oleh Dinas Perindag Prov. Sumbar pada tanggal 5 s.d. 9 Februari 2018 bertempat di Komplek GOR H. Agus salim Padang. Pameran ini merupakan ajang mempromosikan produk dan kegiatan yang terdapat di berbagai stand dari Pemerintah Pusat, BUMN, Kabupaten/Kota se-Sumbar dan pihak swasta. Adapun DPM dan PTSP Prov. Sumbar memiliki stand pada pameran ini.

- **Penyebarluasan Informasi Melalui Media Massa**

Penyebarluasan informasi perkembangan penanaman modal Sumatera Barat melalui media massa sebanyak 4 media yaitu:

- Koran Nasional
- Majalah Nasional
- TV Lokal
- TV Nasional

11. Forum Komunikasi Usaha Daerah

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan pengusaha daerah dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh 100 orang pengusaha daerah yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan pertemuan Forum Komunikasi Usaha Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan tema *"Memajukan Usaha Daerah Melalui Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Usaha"*, diperoleh rumusan sebagai berikut :

- UKM Award bekerjasama melalui Program Kemitraan Forum BUMN,BPR dan Asosiasi/Lembaga terkait.
- Pengembangan bagi UMKM berkembang dengan Profesionalisme Peran Investasi sebagai Salah Satu Tumpuan Ekonomi dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,menciptakan lapangan kerja, mengubah ekonomi yang berbasis konsumsi menjadi ekonomi berbasis produksi, meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak, dan mendorong pemerataan ekonomi.
- Kendala Investasi Sumatera Barat dari Kondisi geografis yang merupakan pegunungan Bukit Barisan, kepulauan Mentawai dan TNKS dengan ketersediaan sumber daya alam yang tidak seimbangmengakibatkan keterbatasan lahan yang dapat di budidayakan dan terkendala bagi sarana dan prasarana terutama transportasi, dengan kondisi penduduk yang relatif sedikit dibandingkan luas wilayah, persebaran yang tidak merata dan terpencar dalam kelompok yang kecil yang terisolasi mengakibatkan tersebarnya kantong kemiskinan di daerah terpencil dan terisolasi menjadi kendala bagi pemerataan kegiatan ekonomi dan pelayanan kebutuhandasar(kehatan&pendidikan)
- Peluan Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat adalah : usaha mobilitas barang dan jasa diiringi pemakaian SDA dan SDM, Geliat UMKMK, Kemitraan Usaha dan investasi dan usaha di daerah dan di berbagai sektor ekonomi
- Memanfaatkan peluang dari hasil pembangunan prasarana dan sarana serta pengalaman untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di daerah dan peluang untuk menanggulagi kemiskinan, landasan dan ketahanan ekonomi yang mantap dan andal untuk membawa rakyat ke taraf kesejahteraan yang lebih tinggi dan merata, kekayaan alam dan jumlah penduduk untuk kekuatan menggerakkan ekonomi yang kuat dan handal, falsafah adat dan budaya : gotong royong, toleransi tenggang rasa, kesetiakawan sosial yang tinggi untuk mewujudkan kemajuan yang mandiri adil dan merata.
- Potensi yang timbul akibat tantangan,kendala danupaya Peluang Pembangunan Ekonomi Sumatera Barat adalah : usaha mobilitas barang dan jasa diiringi pemakaian SDA dan SDM, Geliat UMKMK, Kemitraan Usaha dan investasi dan usaha di daerah dan di berbagai sektor ekonomi.
- Program Kemitraan Biro CSR PT. Semen Padang dengan misi memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya dalam peningkatan citra dan nilai perusahaan secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

- Misi CSR PT Semen Padang adalah : menjaga citra perusahaan melalui peningkatan kualitas hubungan yang baik dengan stakeholders, menerapkan GCG dan meningkatkan tanggungjawab sosial dalam rantai nilai perusahaan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, membina hubungan industrial serta mengembangkan Sumber Daya Manusia, menghargai budaya dan tradisi kearifan local serta penghormatan terhadap HAM, meminimalisasi dampak operasional, meningkatkan penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan serta keterampilan masyarakat yang berkesinambungan.
- Sumber dana dari alokasi laba bersih untuk program Kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil dan koperasi menjadi tangguh dan mandiri, program Bina Lingkungan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat (komunitas) lingkungan.
- Kegiatan Program Kemitraan adalah dengan : pemberian Pinjaman Bergulir, monitoring dan pendampingan dan melakukan pembinaan berupa pelatihan, promosi dan pemasaran.
- Sektor usaha yang dibina melalui CSR PT Semen Padang adalah : industri, perdagangan, perikanan, pertanian, peternakan dan jasa lainnya.
- Pemberdayaan dilakukan untuk UKM Mandiri 2 tahun, UKM Sehat 2 tahun dan UKM Berdaya Saing meningkatkan Dedikasi/Daya juang dan Value Added dengan menerapkan Prinsip-prinsip Manajemen Perusahaan melalui Peningkatan kompetensi Teknis, Sistim Informasi dan pelaporan, Pengembangan Jaringan/Cluster dan Penganugerahan dan Inovasi melalui Kemitraan, Net work/akses pasar, Standarisasi/Integrasi dan Produktivitas/Efisiensi bekerja sama dengan Perbankan lembaga Keuangan dan Investor yang memiliki kekayaan bersih > 500 juta (diluar tanah dan bangunan)atau memiliki omset > 2,5 Milyar setahun
- Kemitraan Usaha dengan Minang Mart melalui persyaratan yang disepakatinyakni : mitra menyiapkan tempat yang layak, bagus dan strategis, merenovasi toko tersebut sesuai dengan standar Minang Mart, menyiapkan equipment untuk keperluan operasional toko, menyetorkan di depan uang jaminan ke PT. Retail Modern Minang (RMM), tergantung dari besarnya toko, RMM mensuplai barang ke toko disesuaikan dengan besaran toko, Toko 100% dikelola oleh RMM, Omset tiap hari ditarik oleh RMM, Semua Biaya Operasional toko dibebankan ke Laba Kotor Toko, Bagi Hasil diambil dari Laba Bersih (Laba Kotor dikurangi Biaya Operasional)

dengan komposisi 65 : 35 (Mitra : RMM), Mitra akan diberikan laporan performance toko setiap bulan, Kesepakatan ini dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS)

12. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi

Keluaran:

Terlaksananya promosi dan misi investasi dengan 6 (enam) kabupaten/kota dari 6 (tujuh) kabupaten/kota yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% dan jumlah calon investor yang difasilitasi sebanyak 6 calon investor sesuai target, sehingga capaian kinerjanya 100%.

Hasil:

Meningkatnya koordinasi promosi dan kerjasama dengan kabupaten/kota serta minat calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Barat, beberapa calon investor yang menunjukkan keseriusan untuk berinvestasi di sektor dan energy baru terbarukan (EBT), Gheothermal dan Indutsri Hilir antara lain:

1. China Huadian Enginer CO, LTD, untuk rencana proyek investasi PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), di Pasaman, Agam dan Solok (Danau diatas dan Danau dibawah),
2. PT Surabaya Indah Permai Indonesia, untuk rencana investasi Industri Hilir Tanaman Nilam untuk memproduksi produk Safe Care (bahan campuran aroma terapi) di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Coze International PIL untuk rencana investasi Gheothermal dan panas bumi untuk di Kabupaten Solok Selatan.
4. Kyuden Mirai Energy, Co.INC, Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. PT. Awina Sinergi International Perusahaan Listrik dari Jepang yang berminat kerjasama Cangkang Sawit untuk dijadikan Sumber Energi ramah lingkungan Pasaman Barat.
6. PT Akuo Energi Indonesia bergerak dalam bidang pengembangan pembangkit listrik skala besar berbasis energi terbarukan yang berminat berinvestasi pada PLTA.

13. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini Jumlah buku Direktori Mitra Usaha Potensial yang ada di 19 Kabupaten dan Kota Sumatera Barat sebanyak 76 buah Buku sesuai dengan target sehingga capaian kinerjanya 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data mitra usaha yang potensial kabupaten / kota di Sumatera Barat

14. Koordinasi Strategi Promosi dan Peluang Investasi

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan GPTU yang dihadiri oleh 40 orang Aparatur DPM & PTSP Kabupaten/Kota seSumatera Barat yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini yang bertemakan "Pengembangan Potensi dan Peluang Investasi Daerah Melalui Strategi Promosi yang Inovatif" membahas tentang strategi promosi yang tepat sesuai dengan kondisi setiap daerah di Sumatera Barat.

15. Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja terhap 45 (empat puluh lima) aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparatur DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat bagaimana budaya kerja dan pola pikir dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

16. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya Bimbingan Teknis tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota se Sumatera Barat dan perusahaan dapat dicapai sesuai target yaitu 80 orang peserta dalam dua kali pelaksanaan sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota dan perusahaan tentang pengendalian dari pelaksanaan penanaman modal sebanyak 2 kali pertemuan.

17. Forum Investasi Sumatera Barat

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan investasi Sumatera Barat yang diikuti oleh 100 (seratus) orang aparatur DPM & PTSP kabupaten/kota, instansi terkait dan perusahaan dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan dihadiri oleh 100 orang peserta sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi.

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 4.491.539.725,- dan dapat direalisasi sebesar Rp. 4.448.243.164,- atau sebesar 97,30%

Realisasi anggaran kegiatan pada program ini pada umumnya diatas 95% dan realisasi anggaran kegiatan yang dibawah 95% adalah anggaran kegiatan Forum PTSP sebesar 94,77% dan anggaran kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan sebesar 94,88%.

Sisa Anggaran pada kegiatan dalam program ini sebagian besar sisa kegiatan yang tidak bisa direalisasikan karena pelaksanaan kegiatan.

Rincian realisasi untuk masing-masing kegiatan adalah :

1. Forum PTSP

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan koordinasi DPM & PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, Instansi Teknis sebanyak 120 orang peserta yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu di kabupaten/kota se Sumatera Barat (sesuai target).

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Keluaran:

Diterbitkannya perizinan dan non perizinan sebanyak 3.125 izin/rekomendasi dari target sebanyak 1.400 izin/rekomendasi, dengan demikian capaian kinerja adalah 223,21%,.

Hasil:

Persentase penerbitan perizinan khusus untuk penanaman modal dari 7 (tujuh) izin yang diterbitkan 4 (empat) izin diterbitkan tepat waktu sesuai dengan SOP dan 3 (dua) izin tidak sesuai dengan SOP disebabkan belum adanya penegasan kewenangan perizinan / penanaman modal antara BKPM RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha dalam pengisian form Pendaftaran dan Waktu pengembalian form serta perubahan kebijakan terkait OSS yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Secara keseluruhan Penerbitan izin/rekomendasi sesuai dengan SOP adalah sebesar 84,10% dengan capaian kinerja sebesar 105,13%.

3. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini tidak berupa Peraturan Gubernur Sumatera Barat tetapi berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat terkait perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) untuk menghindari tumpang tindih nya tugas pokok dan poksi PTSP dengan OPD teknis yakni sebesar 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya Keputusan Gubernur terkait perubahan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). (sesuai target).

4. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai melebihi target yang direncanakan 23 fasilitasi permasalahan perizinan dari 10 yang ditargetkan atau sebesar 230%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah calon investor yang berminat menanamkan modalnya di Sumatera Barat sebanyak 5 calon investor (sesuai target).

5. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan**Keluaran:**

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu 1 kali pertemuan sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara Pelayanan Perizinan kepada 120

kepada aparaturnya, dunia usaha, instansi teknis dan pemangku kebijakan sesuai target 100%.

Hasil:

Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi tentang tata cara pelayanan perizinan lingkup DPM & PTSP Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat.

6. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan yang Berbasis Teknologi Informasi

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat diwujudkan implementasi aplikasi SIP Sakato untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan di DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat sesuai target 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan perizinan serta terimplementasikannya aplikasi SIP Sakato bagi aparaturnya tim teknis dan operator pada OPD teknis.

7. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini dapat dicapai sesuai target yaitu tersosialisasikannya kebijakan pelayanan perizinan kepada 660 orang aparaturnya, dunia usaha, pemuka masyarakat, KAN, LKAAM dan Wali nagari serta pemangku kebijakan, asosiasi organisasi profesi serta OPD teknis . target 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman aparaturnya, dunia usaha, pemuka masyarakat, KAN, LKAAM dan Wali nagari serta pemangku kebijakan, asosiasi organisasi profesi serta OPD teknis tentang kebijakan pelayanan perizinan.

8. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pembinaan kepada DPM & PTSP kabupaten dan kota se Sumatera terkait pelaksanaan pelayanan perizinan kepada 19 kab/kota sesuai dengan target 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini meningkatnya pelayanan perizinan pada DPM & PTSP kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku kepada 19 kab/kota sesuai dengan target 100%

9. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya survey kepuasan kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan perizinan sesuai dengan target 100%

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini diperolehnya hasil penilaian pelayanan perizinan yang diberikan oleh UPP pelayanan perizinan dengan score 3,27% yang masih dibawah target sebesar 3,30%.

10. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Keluaran:

Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya penilaian standar mutu perizinan dan meningkatnya quality management system Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan target 100%.

Hasil:

Hasil dari kegiatan ini adanya perubahan quality management system atau ISO dari 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

D. DATA KINERJA KEUANGAN

Capaian Kinerja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp. 28.651.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.651.800,- atau capaian kinerja keuangan 86,04%.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik sebesar Rp. 167.935.280,- dan terealisasi sebesar Rp. 163.327.094,- atau capaian kinerja keuangan 97,26%.

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 28.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.388.900,- atau capaian kinerja keuangan 98,57%.

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 24.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.999.363,- atau capaian kinerja keuangan 99,99%

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 8.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.409.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,40%

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 17.712.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.370.000,- atau capaian kinerja keuangan 98,07%

7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar dan Dalam Daerah sebesar Rp. 424.958.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 424.588.782,- atau capaian kinerja keuangan 99,91%.

8. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur sebesar Rp. 14.850.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.698.000,- atau capaian kinerja keuangan 81,33%

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman sebesar Rp. 28.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.466.300,- atau capaian kinerja keuangan 99,88%

10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp. 113.595.237,- dan terealisasi sebesar Rp. 113.591.887,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

11. Penyediaan Jasa Sopir Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Sopir Kantor sebesar Rp. 100.599.387,- dan terealisasi sebesar Rp. 98.211.399,- atau capaian kinerja keuangan 97,63%.

12. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pengaman Kantor sebesar Rp. 177.433.125,- dan terealisasi sebesar Rp. 177.340.525,- atau capaian kinerja keuangan 99,95%.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebeuler

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Mebeuler sebesar Rp. 148.461.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.461.500,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputer sebesar Rp. 290.359.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 289.309.900,- atau capaian kinerja keuangan 99,64%.

3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi sebesar Rp. 230.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 198.412.500,- atau capaian kinerja keuangan 86,27%.

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 59.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.476.365,- atau capaian kinerja keuangan 99,96%.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional sebesar Rp. 94.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.326.281,- atau capaian kinerja keuangan 99,61%.

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 32.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.665.300,- atau capaian kinerja keuangan 95,83%.

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeuler sebesar Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%.

8. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD sebesar Rp. 68.333.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.284.500,- atau capaian kinerja keuangan 99,93%.

9. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 397.237.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,31%.

10. Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Kantor

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 118.350.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 118.238.000,- atau capaian kinerja keuangan 99,90%.

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya sebesar Rp. 44.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 44.400.000,- atau capaian kinerja keuangan 100%

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 271.361.050,- dan terealisasi sebesar Rp. 268.344.904,- atau capaian kinerja keuangan 98,89%

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD sebesar Rp. 63.578.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.017.107,- atau capaian kinerja keuangan 99,12%

2. Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar Rp. 229.141.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 220.691.750,- atau capaian kinerja keuangan 96,31%

3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp. 41.471.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.332.550,- atau capaian kinerja keuangan 99,67%

4. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD sebesar Rp. 37.341.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.286.582,- atau capaian kinerja keuangan 99,85%

5. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan sebesar Rp. 27.204.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.977.850,- atau capaian kinerja keuangan 99,17%

F. PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Permasalahan Investasi

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Permasalahan Investasi adalah sebesar Rp. 121.408.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.062.636,- atau capaian kinerja keuangan 98,89%

2. Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 47.978.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.867.300,- atau capaian kinerja keuangan 97,68%

3. Promosi Investasi

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Promosi Investasi adalah sebesar Rp. 1.793.093.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.790.973.705,- atau capaian kinerja keuangan 99,88%

4. Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Updating Sistem Informasi Spasial Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 150.667.850,- dan terealisasi sebesar Rp. 148.150.000,- atau capaian kinerja keuangan 98,32%

5. Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 187.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 185.242.260,- atau capaian kinerja keuangan 98,69%

6. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 123.929.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 121.883.699,- atau capaian kinerja keuangan 98,35%

7. Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Data Perkembangan Penanaman Modal Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 103.334.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 96.349.775,- atau capaian kinerja keuangan 93,24%

8. Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 90.676.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 86.713.480,- atau capaian kinerja keuangan 95,63%

9. Gelar Potensi dan Temu Usaha

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Gelar Potensi dan Temu Usaha adalah sebesar Rp. 234.044.00,- dan terealisasi sebesar Rp. 233.049.585,- atau capaian kinerja keuangan 99,58%

10. Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal

Dukungan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Informasi Penanaman Modal Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 470.408.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 469.132.100,- atau capaian kinerja keuangan 99,73%

11. Forum Komunikasi Usaha Daerah

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Gelar Forum Komunikasi Usaha Daerah sebesar Rp. 70317.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 68.960.704,- atau capaian kinerja keuangan 98,07%

12. Koordinasi Promosi dan Misi Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Promosi dan Misi Investasi sebesar Rp. 59.134.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.230.295,- atau capaian kinerja keuangan 98,47%

13. Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Buku Direktori Mitra Usaha sebesar Rp. 55.576.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.549.950,- atau capaian kinerja keuangan 99,95%

14. Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategi Promosi Peluang Investasi sebesar Rp. 36.629.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.571.389,- atau capaian kinerja keuangan 99,15%

15. Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Workshop Pola Pikir dan Budaya Kerja sebesar Rp. 39.629.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.497.599,- atau capaian kinerja keuangan 97,14%

16. Bimbingan Teknis Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Pengendalian Penanaman Modal sebesar Rp. 79.862.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.614.050,- atau capaian kinerja keuangan 93,43%

17. Forum Investasi Sumatera Barat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Sumatera Barat sebesar Rp. 133.191.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 120.113.700,- atau capaian kinerja keuangan 90,18%

G. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Rincian realisasi kinerja Keuangan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Forum PTSP

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Forum Investasi sebesar Rp. 66.594.150,- dan terealisasi sebesar Rp. 63.112.253,- atau capaian kinerja keuangan 94,77%

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp. 1.848.615.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.841.223.567,- atau capaian kinerja keuangan 99,60%

3. Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Produk Hukum terkait Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 61.837.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.749.800,- atau capaian kinerja keuangan 95,01%

4. Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelayanan Perizinan Terpadu sebesar Rp. 97.671.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.481.337,- atau capaian kinerja keuangan 96,73%

5. Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Harmonisasi tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 60.829.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.714.100,- atau capaian kinerja keuangan 94,88%

6. Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi sebesar Rp. 504.556.525,- dan terealisasi sebesar Rp. 501.750.087,- atau capaian kinerja keuangan 99,44%

7. Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 1.625.855.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.610.315.570,- atau capaian kinerja keuangan 99,04%

8. Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan PTSP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebesar Rp. 67.936.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65.036.750,- atau capaian kinerja keuangan 95,73%

9. Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan sebesar Rp. 67.872.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 67.391.200,- atau capaian kinerja keuangan 99,29%

10. Penilaian Standar Mutu Perizinan

Anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan Penilaian Standar Mutu perizinan sebesar Rp. 89.772.250,- dan terealisasi sebesar Rp. 88.468.500,- atau capaian kinerja keuangan 98,55%

IV. PENUTUP

Pada dasarnya dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada permasalahan, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai jadwal dan target yang direncanakan. Sehubungan dengan adanya beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 95% terkait dengan adanya efisiensi pada beberapa belanja seperti perjalanan dinas luar daerah, Sewa Tempat, Jasa Akomodasi, Bantuan Transportasi

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini disusun agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2019
**KEPALA DPM & PTSP
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MASWAR DEDI, A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001